

**FUNGSI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
PEREMPUAN MELALUI KEGIATAN PEMBERDAYAAN (Survei Pada
Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja)**

***THE FUNCTION OF VILLAGE FUNDS IN INCREASING
WOMEN'S INCOME THROUGH EMPOWERMENT
ACTIVITIES (Survey on Lembang Saluallo, North Sangalla
District, Tana Toraja District)***

SKRIPSI

**DELVIANA USI
E031181009**



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**FUNGSI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PEREMPUAN MELALUI KEGIATAN
PEMBERDAYAAN
(Survei Pada Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara,
Kabupaten Tana Toraja)**

SKRIPSI

**DELVIANA USI
E031181009**



**SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH
DERAJAT KESARJANAAN PADA DEPARTEMEN SOSIOLOGI**

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : FUNGSI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PEREMPUAN MELALUI KEGIATAN
PEMBERDAYAAN (SURVEI PADA LEMBANG
SALUALLO, KECAMATAN SANGALLA UTARA,
KEBUPATEN TANA TORAJA)

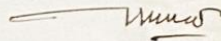
NAMA : DELVIANA USI

NIM : E031181009

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

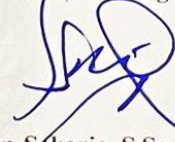
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Mansur Radjab, M.Si
NIP. 195807291984031003

Pembimbing II

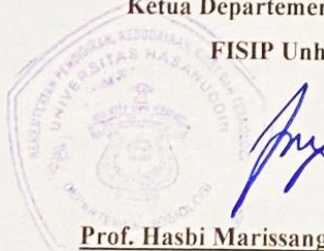


Dr. Sakaria, S.Sos., M.Si
NIP . 196901302006041001

Mengetahui,

Ketua Departemen Sosiologi

FISIP Unhas



Prof. Hasbi Marissangan, M.Si, Ph.D
NIP 19630827 19911 1 003

LEMBAR PENERIMAAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Evaluasi Skripsi
pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Oleh :

NAMA : DELVIANA USI

NIM : E031181009

**JUDUL : FUNGSI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PEREMPUAN MELALUI KEGIATAN
PEMBERDAYAAN (SURVEI PADA LEMBANG
SALUALLO, KECAMATAN SANGALLA UTARA,
KABUPATEN TANA TORAJA)**

Pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Maret 2023

Tempat : Ruang Ujian Departemen Sosiologi

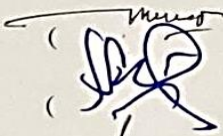
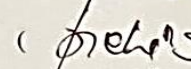

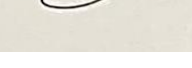
TIM EVALUASI SKRIPSI

Ketua : Dr. Mansyur Radjab, M.Si

Sekretaris : Dr. Sakaria, S.Sos., M.Si

Anggota : Dr. Buchari Mengge, MA

: Andi Nurlela, S.Sos., M.Si

()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Delviana Usi
NIM : E031181009
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul Fungsi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Perempuan Melalui Kegiatan Pemberdayaan (Survei Pada Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja), adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain.

Makassar, 17 Maret 2023
Yang Memberi Pernyataan



Delviana Usi
E031181009

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam mencapai suatu tujuan
Jalannya tidak selalu mudah
Banyak godaan yang datang menghambat
Terkadang menemui rasa kecewa, kehilangan,
makaian dan tekanan hidup lainnya
Yang menguras banyak air mata
Sehingga ingin rasanya memilih berhenti
Tapi aku selalu dikelilingi orang-orang baik
Yang selalu mendukung dan menguatkan agar bangkit lagi
Sampai akhirnya mencapai tujuan yang diinginkan.
Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan.
Selama kita menjadi orang baik pasti akan dikelilingi dengan orang baik

Skripsi ini kupersembahkan untuk semua orang yang ingin
membacanya, serta orang-orang yang kusayangi: keluargaku, guruku,
sahabatku, kekasihku dan orang-orang yang selalu mendoakanku

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas kehendak-Nya penulis dapat melalui masa perkuliahan dan penyusunan skripsi. selesainya skripsi ini yang berjudul **Fungsi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Perempuan Melalui Kegiatan Pemberdayaan (Survei Pada Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja)** penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Ini semua tidak terlepas dari dukungan mama, papa, saudara, dan keluarga atas segala pengorbanan, nasehat, dan doa-doa yang tidak pernah berhenti yang begitu banyak membantu penulis. Semoga Tuhan senantiasa menjaga setiap langkah dan penulis diberikan kesempatan untuk membalasnya.

Kepada bapak **Dr. Mansyur Radjab, M.Si** selaku pembimbing I dan bapak **Dr. Sakaria, S.Sos., M.Si** selaku pembimbing II saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesabaran dalam membimbing penulis tanpa lelah membimbing serta mengarahkan bagaimana menulis dan menyusun skripsi dengan benar, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada bapak **Dr. Buhari Mengge, MA** serta ibu **Andi Nurlela, S.Sos., M.Si** selaku dosen penguji penulis. Semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. **Prof. Hasbi Marissangan, M.Si., Ph.D** selaku Ketua Departemen Sosiologi dan **Dr. Ramli AT, M.Si** selaku Sekretaris Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak dan Ibu Dosen Departemen Sosiologi** untuk ilmu yang diberikan selama penulis berkuliah. Berbagai bentuk dukungan dan kesempatan yang diberikan untuk merasakan berbagai pengetahuan dan pengalaman baru.
5. Seluruh **Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, juga kepada **staf Departemen Sosiologi Pak Pasmudir** dan **Ibu Rosnaeni** yang telah membantu dan memudahkan dalam penyusunan berkas studi selama penulis berkuliah dan menyusun skripsi.
6. **Kepala Lembang Saluallo dan seluruh Stafnya** yang telah memberikan izin serta data-data yang diperlukan oleh penulis selama proses penelitian. Terima kasih juga kepada **Sekretaris Lembang** yang banyak meluangkan waktu dalam membantu dan mengarahkan selama proses penelitian.

7. **Seluruh Masyarakat Lembang Saluallo terutama perempuan yang menjadi responden penelitian** yang bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi dan data skripsi ini.
8. Kepada saudara saya **Selni, Jon, Anti, Suso, Novi, Tiku** yang selalu memberikan *support* kepada penulis selama menyelesaikan masa studi di Universitas Hasanuddin.
9. Sahabat saya **Plainness** yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan masa studi serta menjadi keluarga meski tanpa ikatan dara.
10. **Kemasos FISIP Unhas.** Terima kasih atas pengalaman dan pelajaran yang diberikan selama selama penulis berproses di dunia kampus.
11. Keluarga besar **PMKO FISIP Unhas dan kawan-kawan Amore 2018** yang telah menyambut hangat penulis selama berproses bersama.
12. Kepada sahabat dan saudaraku **POSITIVIS 18**, terima kasih sudah menjadi tempat pulang dan mewarnai hidup penulis selama ini. Semoga selalu diberikan kesehatan agar ada banyak kesempatan tertawa bersama untuk hari besok dan seterusnya.
13. Kepada teman-teman **saudara seiman**, Yaski, Agung, Albert, Claudia, Femi, Kezia, Lea, Michael, Rati, Rini, Vinan, Wiking, Budi.
14. Kepada **Rini, Lea, Julia, Fikri, Nanda, Putri** yang telah banyak memberikan bantuan dan menginspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
15. **M. Reva, Vinan, Oktaviani, Selvi dan Rervin** yang telah menemani

penulis dalam melakukan penelitian

16. **Vivi, Intan, Amalia** sahabat yang selalu dapat menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi cerita suka duka kehidupan ini, yang sangat nyaman bagi penulis.
17. **Endy** yang telah berperan penting dalam kehidupan penulis, yang telah memberikan dukungan baik fisik maupun materi.
18. **Teman-teman KKN Toraja**, Terima kasih telah menjadi partner penulis selama **ber-KKN**.
19. Teruntuk orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis. Juga kepada orang yang membaca skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis sangat berharap saran maupun kritik dari semua pembaca yang dapat membangun untuk lebih baik kedepannya.

Makassar, 17 Maret 2023

Delviana Usi

ABSTRAK

Delviana Usi . E031181009. Penelitian ini berjudul Fungsi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Perempuan Melalui Kegiatan Pemberdayaan (Survei Pada Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja. Dibimbing oleh Dr. Mansyur Radjab, M.Si sebagai pembimbing satu, dan Dr. Sakaria, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing dua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dana desa dalam meningkatkan pendapatan perempuan melalui kegiatan pemberdayaan pada Lembang Saluallo, kecamatan sangalla utara, Kabupaten Tana Toraja. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Strategi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Teknik penentuan sampel menggunakan simple random sampling. Teknik penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dan diperoleh sebanyak 60 responden.

Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa dana desa telah berfungsi di Lembang Saluallo dalam bidang sosial, bidang ekonomi dan bidang ekologi/lingkungan dan dana desa dipergunakan dengan baik sesuai amanat undang-undang. Program Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembang Saluallo untuk perempuan seperti menenun, menjahit, pembuatan tas kur, pembuatan kue, budidaya ayam kampung, dan pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk sayur-sayuran dan obat-obatan. Melalui pemberdayaan tersebut masyarakat Lembang Saluallo khususnya perempuan yang dulunya hanya tinggal di rumah mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak memiliki penghasilan kini memiliki penghasilan sendiri, sehingga mampu membantu perekonomian keluarganya dan perempuan lebih disegani dalam masyarakat Lembang Saluallo.

Kata Kunci : Dana Desa, Pemberdayaan, Pendapatan, Sosial, Ekonomi

ABSTRACT

Delviana Usi. E031181009. This thesis is entitled *The Function of Village Funds in Increasing Women's Income through Empowerment Activities (Survey on Lembang Saluallo, North Sangalla District, Tana Toraja District)*. Guided by Dr. Mansyur Radjab, M.Si as supervisor one, and Dr. Sakaria, S.Sos., M.Si as supervisor two.

This study aims to determine the function of village funds in increasing women's income through empowerment activities in Lembang Saluallo, north Sangalla district, Tana Toraja Regency. In this study, the approach used was a quantitative descriptive approach. The research strategy used in this study is survey research. The sample determination technique uses simple random sampling. The sample determination technique used the Slovin formula and obtained as many as 60 respondents.

The results of this study show that village funds have functioned in Lembang Saluallo in the social, economic and ecological/environmental fields and village funds are used properly according to the mandate of the law. Lembang Saluallo empowerment activities program for women such as weaving, sewing, making kur bags, making cakes, cultivating kampung chickens, and using home yard land for vegetables and medicines. Through this empowerment, the Lembang Saluallo community, especially women who used to only stay at home doing housework and have no income, now have their own income, so they can help their family's economy and women are more respected in the Lembang Saluallo community.

Keywords : Village Funds, Empowerment, Income, Social, Economic

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PENERIMAAN TIM EVALUASI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR DIAGRAM	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	9
A. Fungsi Dana Desa	9
B. Teori Yang Relevan	12
C. Konsep Pembangunan	16
D. Pemberdayaan Masyarakat	19
E. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan	22
F. Pendapatan Perempuan	24
G. Penelitian Terdahulu	26
H. Kerangka Pikir	28
I. Definisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Strategi Penelitian.....	31
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	32

C.	Populasi dan Sampel.....	32
D.	Teknik Pengumpulan Data	34
E.	Teknik Analisis Data	36
F.	Teknik Penyajian Data.....	37
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
A.	Sejarah Lembang Saluallo	39
B.	Letak Geografis	41
C.	Jumlah Penduduk Lembang Saluallo	42
D.	Tingkat Pendidikan.....	43
E.	Mata Pencaharian	44
F.	Kondisi Ekonomi Lembang Saluallo.....	45
G.	Prasarana Lembang Saluallo	45
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A.	Karakteristik Responden.....	49
B.	Fungsi Dana Desa terhadap masyarakat Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja.....	54
C.	Bentuk program pemberdayaan Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja.....	75
D.	Tingkat pendapatan perempuan setelah adanya program pemberdayaan Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja.....	86
BAB VI	PENUTUP	92
A.	Kesimpulan.....	92
B.	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 5.1 Penenun Lembang Saluallo	78
Gambar 5.2 Pelatihan Ternak Ayam Kampung	79

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas-Batas Lembang Saluallo	42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin	42
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	43
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan	44
Tabel 4.5 Mata pencaharian penduduk Lembang Saluallo	44
Tabel 4.6 Sarana dan prasarana yang ada di Lembang Saluallo	46
Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur.....	50
Tabel 5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama.....	52
Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Sampingan	53
Tabel 5.4 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Fungsi Sarana Kesehatan....	55
Tabel 5.5 Distribusi jawaban Responden Terhadap Peningkatan Pengetahuan Masyarakat.....	61
Tabel 5.6 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Perbaikan Kualitas Lahan ...	64
Tabel 5.7 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Perbaikan Infrastruktur Jalan	65
Tabel 5.8 Distribusi Responden Terhadap Peningkatkan Pendapatan Masyarakat	67
Tabel 5.9 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pencegahan Pencemaran Air	69
Tabel 5.10 Distribusi Responden Terhadap Pencegahan Pencemaran Udara.....	71
Tabel 5.11 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pembangunan Infrastruktur	72
Tabel 5.12 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pembelian Barang Dagangan Yang Terjadi	81
Tabel 5.13 Distribusi Jawaban Responden Kemampuan Masyarakat Dalam Berorganisasi	85
Tabel 5.14 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Hasil Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Lembang	85
Tabel 5.15 Distribusi Jawaban Responden Hasil Kegiatan Pembangunan Infrastruktur	86
Tabel 5.16 Distribusi Jawaban Responden terhadap Pendapatan Perempuan	87
Tabel 5.17 Distribusi responden kegiatan yang diikuti dengan pendapatan perempuan.....	88

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51
Diagram 5.2 Distribusi Responden Terhadap Memperoleh Akses Pendidikan...	57
Diagram 5.3 Distribusi Responden Terhadap Kegiatan Gotong Royong	58
Diagram 5.4 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Akses Keagamaan.....	60
Diagram 5.5 Distribusi Responden Terhadap Peningkatan Keterampilan Masyarakat.....	62
Diagram 5.6 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	63
Diagram 5.7 Distribusi Jawaban Terhadap Perbaikan Memperbaiki Akses Pasar	66
Diagram 5.8 Distribusi responden terhadap Kesempatan Kerja/ Peluang Usaha .	68
Diagram 5.9 Distribusi Responden Terhadap Pencegahan Pencemaran Tanah	70
Diagram 5.10 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Kegiatan Pemberdayaan	76
Diagram 5.11 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Kegiatan Pelatihan Untuk Perempuan Lembang Saluallo	77
Diagram 5.12 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Terjadinya Peningkatan Penjualan.....	80
Diagram 5.13 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Intensitas Perempuan Dalam Keterlibatan Pemberdayaan	82
Diagram 5.14 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Masyarakat Pernah Hadir Dalam Rapat Dana Desa	83
Diagram 5.15 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Keputusan Dana Desa Sesuai Kebutuhan Masyarakat.....	84
Diagram 5.16 Distribusi jawaban responden terhadap Pendapatan Keluarga Setelah Pemberdayaan	89
Diagram 5.17 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Kebutuhan Terpenuhi Setelah Pemberdayaan	90
Diagram 5.18 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Perempuan Merasa Berdaya Setelah Pemberdayaan.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Kuesioner.....	99
2. Lampiran Dokumentasi Penelitian.....	105
3. Lampiran Hasil SPSS.....	108
4. Lampiran Surat Izin Penelitian.....	122
5. Daftar Riwayat Hidup	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi hampir semua Negara berkembang terutama yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan juga merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat (Nabia Nada, 2019).

Mengetahui penduduk Indonesia masih banyak yang sulit memenuhi kebutuhan dasarnya maka strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat (Hulu Yamulia, 2018).

Hadi Prayitno dan Budi Santoso mengemukakan bahwa strategi pembangunan dinegara berkembang akan lebih baik jika menggunakan strategi pembangunan berupa penciptaan lapangan kerja, reinvestasi, pemenuhan kebutuhan pokok, pengembangan sumber daya manusia mengutamakan sektor pertanian, pengembangan sektor pedesaan terpadu dan penataan ekonomi nasional. Sedangkan strategi pembangunan dalam era

otonomi harus mengacu pada berkembangnya otonomi daerah dan semakin meningkatnya kemandirian dan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, yang bermuara kepada tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, berkurangnya penduduk miskin dan desa tertinggal serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat. (Tulus, 2014)

Dalam otonomi daerah pembangunan dimulai dari level pemerintah terendah yakni desa. Pembangunan desa menjadi prioritas karena desa memiliki karakteristik permasalahan yang membelit. Melalui pengalokasian dana desa diharapkan desa mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman potensi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya, guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Alokasi dana desa pemerintah menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa.

Dana desa yaitu dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan melalui rekening kas desa diperuntukkan bagi desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana desa sebagai bentuk Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Pembangunan desa sesuai yang

diamanatkan dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui: (1) penyediaan kebutuhan dasar; (2) pembangunan sarana dan prasarana; (3) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan (4) pemanfaatan SDA-Lingkungan secara berkelanjutan (Musran Munizu, 2018).

Pengelolaan dana desa masih menimbulkan berbagai masalah dan tantangan yang ada dalam mengelola dana desa baik masalah internal maupun masalah eksternal. Dana Desa dapat digunakan sesuai potensi dan masalah yang ada di desa sebagai pendapatan indeks desa membangun. Sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 67 mengamanatkan secara mandiri agar desa dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan atas hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa dan juga mendapatkan sumber pendapatan.

Kabupaten Tana Toraja memiliki luas wilayah 2.054,30 km² merupakan wilayah pegunungan bagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Tana Toraja memiliki 19 Kecamatan, 47 Kelurahan, 112 Lembang Ibukota dari Kabupaten ini ada di Kecamatan Makale. Kebanyakan masyarakat Tana Toraja bekerja sebagai petani, komoditas andalan dari Daerah Toraja adalah sayur-sayuran, kopi, cengkeh, coklat, dll.

Dalam menunjang segala kegiatan mengenai Dana Desa di Tana Toraja tentu ada visi misi yang akan dijalankan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan di desa untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya baik

itu dalam infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Untuk itu peran masyarakat dan pemerintah sangatlah penting baik dalam pengelolaan dana maupun partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan untuk menunjang keberhasilan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subhan tahun 2019 dengan judul “Kontribusi alokasi dana desa pada peningkatan ekonomi masyarakat (studi kasus desa Teluk Langkep, Kabupaten Tebo)” menyatakan bahwa sebagian dari dana desa ADD yang diperuntukkan dalam pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD maka penggunaan ADD tidak sesuai peruntukannya. Sehingga sumber daya masyarakat disana kurang matang dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat (Subhan, 2019).

Dalam pembangunan memandang inisiatif dan kreatifitas masyarakat sebagai sumber utama pembangunan dan memandang kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan yang harus dicapai. Di Lembang Saluallo berbagi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan baik melalui kebijakan nasional maupun daerah berupaya untuk menjadikan masyarakat diberdayakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penggunaan dana desa di Lembang Saluallo tahun 2022 terfokus pada bantuan langsung tunai, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang di diberikan oleh pemerintah dapat dikelola agar sosial ekonomi masyarakat dapat terangkat atau teratasi, Masyarakat bisa

mendirikan usaha sendiri sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk meminimalisir angka kemiskinan yang ada di desa dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Mia Ajeng Alifiana di Kota Kudus tahun 2018 dengan judul “Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Melalui Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK di Kota Kudus” menyatakan bahwa ibu-ibu PKK RW 7 kelurahan Mlati Norowito pada dasarnya terbuka dengan setiap ilmu baru terkait dengan keterampilan yang dapat menghasilkan dan dapat menambah pendapatan keluarga. Berdasarkan penyuluhan kewirausahaan dan praktek pembuatan aksesoris handmade untuk hijab, jika terjual akan dapat menambah pendapatan keluarga (Alifiana, 2018).

Dalam masyarakat desa perempuan biasanya hanya tinggal di rumah untuk mengerjakan pekerjaan sebagai seorang istri mengurus rumah tangga dan mengurus anak. Kadang kala perempuan sendiri yang menikmati peran yang selama ini dilakukan, cukup didalam rumah tanpa ada keinginan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan perannya sebagai makhluk sosial. Perempuan sering tidak memperoleh persamaan hak dengan laki-laki, perempuan sering dinilai bisa dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.

Secara kuantitas jumlah penduduk perempuan Indonesia jauh lebih banyak daripada laki-laki. Sebagian besar berdiam di Pedesaan, tertinggal dan memiliki pendidikan yang rendah. Sumber daya ini akan menjadi beban jika tidak dimaksimalkan peran dan fungsinya dalam segala hal pembangunan.

Sebaliknya, akan menjadi suatu sumber daya yang besar manfaatnya jika mampu diarahkan menjadi insan yang berdaya guna tinggi melalui pemberdayaan. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam akses partisipasi, control dan manfaat di semua bidang pembangunan. Namun seiring dengan perkembangan zaman perempuan mulai diberikan ruang untuk terlibat dalam pembangunan.

SDGs (*Sustainable Development Goals*) bertujuan untuk terciptanya kondisi yang menempatkan semua warga desa dalam posisi yang adil tanpa diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan dan membuka kesempatan yang sama bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa. baik sebagai aparatur desa maupun dalam Badan Perwakilan Desa (BPD); median usia kawin pertama perempuan; layanan kesehatan untuk perempuan, dan layanan pendidikan untuk perempuan; serta keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Berhubungan dengan gambaran diatas Lembang Saluallo berupaya memberdayakan masyarakatnya dengan membuat program-program. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah pada Lembang Saluallo untuk meningkatkan pendapatan perempuan yaitu dengan membuat program pemberdayaan perempuan yang diwadahi oleh PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga). Dari pengamatan penulis program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga) di Lembang Saluallo yaitu pelatihan menenun, menjahit, pembuatan tas kur, pembuatan kue, budidaya ayam kampung, dan pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan untuk sayur-sayuran dan obat-obatan.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis terkait upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan perempuan di Lembang Saluallo melalui program pemberdayaan perempuan yang diwadahi oleh PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “Fungsi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Perempuan Melalui kegiatan Pemberdayaan (Survei Pada Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi dana desa terhadap Masyarakat Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana bentuk program pemberdayaan Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja?
3. Bagaimana peningkatan pendapatan perempuan setelah adanya program pemberdayaan Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi dana desa terhadap masyarakat Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui bentuk program pemberdayaan Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja.
3. Untuk mengetahui tingkat pendapatan perempuan setelah adanya program pemberdayaan Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat berguna sebagai rujukan atau referensi bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya dalam menganalisis Fungsi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Perempuan Melalui Program Pemberdayaan

2. Manfaat Praktis

Dapat berguna sebagai masukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan mengenai pemberdayaan perempuan dalam peningkatan pendapatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Fungsi Dana Desa

Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kuantitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu.

Fungsi juga merujuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan “masih berfungsi” atau “tidak berfungsi” fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh dan sebagainya. Secara kuantitatif fungsi dapat menghasilkan jumlah tertentu sesuai dengan target, proyeksi, atau program yang telah ditentukan.

- Dana desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Desa, 2016).

Sastramihardja (1999) menyatakan bahwa desa merupakan suatu

sistem sosial yang melakukan fungsi internal yaitu mengarah pada pengintegrasian komponen-komponenya, sehingga seluruhnya merupakan suatu sistem yang bulat dan mantap. Disamping itu, fungsi eksternal dari sistem sosial antara lain proses-proses sosial dan tindakan-tindakan sistem tersebut akan menyesuaikan diri atau menanggulangi suatu situasi yang dihadapinya sistem sosial tersebut mempunyai elemen-elemen yaitu tujuan, kepercayaan, perasaan, norma, status, peran, kekuasaan, derajat, atau lapisan sosial, fasilitas dan wilayah. (Muhammad Zid, 2016)

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota. Penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, diprioritaskan pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang dimana hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang ada di desa yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkannya dana desa sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

- Pengelolaan keuangan desa

Menurut peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor

113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup (Herlianto, 2017):

1. Perencanaan (penyusunan) anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa)
 2. Pendapatan dan belanja
 3. Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dll
 4. Pembelanjaan atau alokasi
- Asas-asas pengelolaan keuangan desa
 - Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa
 - b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu asas yang paling penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparansi yang berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan *stakeholder* lainnya mengenai informasi sumber keuangan desa, penyaluran keuangan desa, penggunaan keuangan desa harus transparan dan terbuka. Selain itu, terdapat asas akuntabel, partisipatif dan tertib yang tidak kalah pentingnya dengan asas utama dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan desa (Indawati, 2017)

B. Teori yang Relevan

Dalam penelitian ini tentu membutuhkan teori yang dianggap relevan yaitu:

- a. Teori Fungsionalisme Struktural

Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons adalah perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem. Sistem ini terbagi dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian lainnya. Perubahan yang terjadi

pada suatu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Seperti halnya dalam objek yang akan penulis teliti terkait fungsi dana desa dalam meningkatkan pendapatan perempuan melalui program pemberdayaan, jika dana desa tidak difungsikan sesuai dengan program pemberdayaan pemerintah desa maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan dan pada akhirnya akan mempengaruhi bagian lainnya.

Agar dapat lestari, suatu sistem harus melaksanakan keempat fungsi tersebut (Ritzer, 2012).

1. Adaptasi: suatu sistem harus mengatasi kebutuhan mendesak yang bersifat situasional eksternal. Sistem itu harus beradaptasi dengan lingkungannya dan mengadaptasikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.
2. Pencapaian tujuan: suatu sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integrasi: suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian dari komponennya. Iya juga harus mengelola hubungan di antara tiga imperatif fungsional lainnya (A,G,L).
4. Latensi (Pemeliharaan Pola): suatu sistem harus menyediakan, memelihara, dan memperbarui baik motivasi para individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan menopang motivasi itu.

Dalam penelitian ini penulis ingin menggunakan teori AGIL dari Talcott Parsons untuk meneliti Fungsi Dana Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Perempuan melalui Program Pemberdayaan pada Lembang Saluallo Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja. Pada fungsi pertama dari Talcott Parsons tentang adaptasi penulis bermaksud untuk melihat bagaimana masyarakat menyesuaikan diri dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mereka, bagaimana perempuan meluangkan waktu untuk mengikuti program pemberdayaan. Pada fungsi kedua tentang pencapaian tujuan, penulis bermaksud untuk melihat bagaimana dana desa dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam program pemberdayaan seperti peningkatan pendapatan dll. Pada fungsi yang ketiga tentang integritas, penulis bermaksud untuk melihat bagaimana anggota PKK dalam menjalin hubungan satu sama lain dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat, tentu di dalamnya ada sanksi-sanksi yang berlaku untuk anggota yang melanggar. Pada fungsi keempat tentang latensi (pemeliharaan pola-pola) penulis bermaksud untuk melihat bagaimana mempertahankan budaya baru yang diterapkan melalui pemberdayaan masyarakat dan menjaga motivasi individu-individu dalam mengikuti program pemberdayaan.

b. Teori Struktur Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam suatu masyarakat yang tertata dalam suatu struktur yang cenderung bersifat

tetap. Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat itu diharapkan dapat berfungsi dengan baik, sehingga akan tercipta suatu keteraturan, ketertiban, dan kedamaian dalam hidup masyarakat. Untuk mewujudkannya diperlukan adanya unsur-unsur tertentu.

Menurut Charles P. Loomis, struktur sosial tersusun atas sepuluh unsur penting berikut ini. (Dora, 2020)

1. Adanya pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh para anggota masyarakat yang berfungsi sebagai alat analisis dari anggota masyarakat.
2. Adanya perasaan solidaritas dari anggota-anggota masyarakat
3. Adanya tujuan dan cita-cita yang sama dari warga masyarakat
4. Adanya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dijadikan sebagai patokan dan pedoman bagi anggota masyarakat dalam bertingkah laku
5. Adanya kedudukan dan peran sosial yang mengarahkan pola-pola tindakan atau perilaku warga masyarakat
6. Adanya kekuasaan, berupa kemampuan memerintah dari anggota masyarakat yang memegang kekuasaan, sehingga sistem sosial dapat berlanjut.
7. Adanya tingkatan dalam sistem sosial yang ditentukan oleh status dan peran anggota masyarakat
8. Adanya sistem sanksi yang berisikan ganjaran dan hukuman dalam sistem sosial, sehingga norma tetap terpelihara.

9. Adanya sarana atau alat-alat perlengkapan sistem sosial, seperti pranata sosial dan lembaga
10. Adanya sistem ketegangan, konflik, dan penyimpangan yang menyertai adanya perbedaan kemampuan dan persepsi warga masyarakat.

C. Konsep Pembangunan

Pembangunan pada hakikatnya merupakan usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tentram, serta lebih menjamin kelangsungan hidup di hari depan. Dalam konteks keIndonesiaan, harapan tersebut diwujudkan dengan kata “adil” dan “makmur” dalam konteks ini, tentu saja setiap pembangunan menghendaki adanya perubahan dan perubahan merupakan proses dan usaha yang diarahkan dengan maksud mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pembangunan pedesaan mempunyai peran penting dalam konteks pembangunan nasional. Sekitar 65% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Oleh karena itu pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

Dalam pembangunan desa, pemerintah desa mempunyai peran yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat (Media, 2019).

Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip:

- 1) Transparansi (terbuka)
- 2) Partisipatif
- 3) Dapat dinikmati masyarakat
- 4) Dapat dipertanggung jawabkan
- 5) Berkelanjutan (akuntabilitas)
- 6) Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan

Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa adalah (Sajogyo, 2002)

- 1) Pemanfaatan sumber daya manusia dan potensi alam
- 2) Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat
- 3) Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat
- 4) Pengembangan tata desa yang teratur dan serasi

Dalam pembangunan terdapat beberapa tahap yaitu:

1. Tahap perencanaan

Sebelum pembangunan dilaksanakan, pemerintah menyerap aspirasi masyarakat yang menghendaki peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik. Selain menyerap aspirasi tersebut, pemerintah juga harus memiliki visi jauh ke depan untuk memajukan masyarakatnya. Perpaduan aspirasi masyarakat dan visi pemerintah inilah yang kemudian dituangkan dalam rencana pembangunan nasional.

2. Tahap pelaksanaan

Setelah perencanaan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan segala sesuatu yang tertuang dalam rencana harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Pemerintah berperan sebagai agen pembangunan (pelopor), tetapi dukungan dan partisipasi masyarakat tetap diperlukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan rencana harus diperhatikan. Keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan sangat diharapkan.

3. Tahap evaluasi

Untuk mengetahui apakah suatu proses pembangunan telah berhasil atau belum, dilakukan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap akibat perubahan sosial yang terjadi sebagai hasil pembangunan. Dengan evaluasi dapat diketahui dan diidentifikasi aspek-aspek yang kurang, macet, mundur, dan merosot. Selanjutnya dilakukan upaya perbaikan. Evaluasi juga memberikan informasi mengenai keberhasilan-keberhasilan pembangunan.

Pembangunan terbagi menjadi pembangunan secara fisik dan pembangunan non fisik.

1. Pembangunan fisik meliputi sarana dan prasarana pemerintahan seperti jalan, jembatan, pasar, pertanian dan irigasi. Letak geografis sebuah desa sangatlah menentukan sekali percepatan di dalam sebuah pembangunan. Letaknya strategis, dalam arti tidak sulit untuk dijangkau akibat relief geografisnya (bappeda, 2017).

2. Pembangunan non fisik atau sosial yaitu: pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Pembangunan fisik dilakukan guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Mokoagow, 2017).

Pembangunan non fisik menjadi dasar pembangunan fisik, jangan sampai pembangunan bertumpu pada salah satu aspek saja, tetapi pembangunan tersebut haruslah bersinergi satu sama lain. Sehingga pembangunan harus ada keseimbangan antara pembangunan fisik atau pembangunan non fisiknya.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya pada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya. Yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial budaya, ekonomi, politik, keamanan, dan lingkungan (Tulus, 2014).

Pengertian pemberdayaan sebenarnya mencakup kekuatan sendiri, kemandirian, pilihan sendiri, kedaulatan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianut seseorang atau masyarakat, kapasitas untuk memperjuangkan hak

kemerdekaan, pembuatan keputusan sendiri, menjadi bebas, kebangkitan dan kapabilitas. Sumodiningrat (1997:165) dalam jurnal (Setianingsih, 2016) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan iyalah dengan memberdayakan masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian peningkatan pendapatan masyarakat atau dalam program-program yang dijalankan baik oleh aparat desa maupun pemerintah.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia, penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Upaya memberdayakan masyarakat, Kartasamita (1997: 13) dalam jurnal (Tulus, 2014) mengemukakan pemikirannya bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi, yakni:

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini

meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

3. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti; modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar.

Model pemberdayaan masyarakat dapat dibedakan melalui tiga tingkat yaitu mikro, meso, dan makro (Suharto, 2005) dalam buku sosiologi perubahan sosial (Nanang, 2018). Pada tingkat mikro pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, serta crisis intervention. Pada tingkat meso, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dll. Pada tingkat makro pemberdayaan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, dll.

E. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program ini dapat berupa pelatihan, workshop, permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam peraturan menteri desa tahun 2017 dalam bidang pemberdayaan, dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumbernya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan desa yaitu:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
- b. Pembangunan kapasitas di desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa,
- d. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa,
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup,
- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penangannya.
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan lembaga ekonomi lainnya.
- j. Pengembangan kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, dan
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti kekuasaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tidak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

Perempuan harus diberdayakan karena pertama jumlah penduduk yang banyak, dengan jumlah perempuan yang besar di Indonesia akan menjadi

peluang untuk meningkatkan perekonomian jika pemberdayaan perempuan dapat dioptimalkan dengan baik, namun akan menjadi beban bagi Negara jika dibiarkan tanpa diberdayakan. Oleh karena itu penting melibatkan perempuan dalam pembangunan. Kedua perempuan sebagai pengasuh dan pendidik dalam rumah tangga. Kebanyakan mengasuh dan mendidik dalam rumah tangga diserahkan kepada seorang perempuan. Kebiasaan yang ditanamkan seorang ibu kepada anak-anak dalam rumah tangga merupakan pendidikan awal yang akan tertanam pada diri anak.

F. Pendapatan Perempuan

Pendapatan masyarakat adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Pendapatan masyarakat sebagaimana pemikiran Rosyidi bahwa arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah atau gaji, bunga, sewa atau laba.

Salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu yang dialami perempuan, disebabkan oleh gender. Ada beberapa jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. (Fakih, 2016)

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, namun juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur, dan bahkan Negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah

tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.

Dengan hadirnya program SDGs Desa no 5 keterlibatan perempuan desa dengan tujuan, pada tahun 2030, tujuan SDGS desa adalah terciptanya kondisi yang menempatkan semua warga desa dalam posisi yang adil, tanpa diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan. Selain memberikan perlakuan yang adil, dibuka kesempatan yang sama dalam urusan publik bagi perempuan desa dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

PKK adalah satu-satunya saluran pemerintah untuk melaksanakan program-program bagi kaum wanita di tingkat masyarakat bawah di Kota dan Desa. Peran PKK penting karena merupakan lembaga perantara tunggal antara Negara dan kaum wanita desa. Yang diperantarai adalah kekuasaan Negara melalui berbagai wilayah berpengaruh, yaitu sosial, budaya, ideologi, politik, dan ekonomi (Suryakusuma, 2021).

Dalam rumusan yang dibuat Negara, 10 program PKK lebih kompleks daripada sekedar merangkai bunga, menyulam, ataupun memasak. Program-program tersebut yaitu: p4 (pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila, gotong royong, gizi, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan dasar, koperasi, perlindungan dan pelestarian lingkungan, perencanaan rumah tangga. Program-program tersebut dirancang untuk keperluan pembangunan yang dijalankan pemerintah.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yusran Munizu, dkk (2018)	Penyusunan data dan informasi tentang manfaat dana desa: provinsi Sulawesi Selatan	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif	Hasil penelitian yang didapatkan yaitu: pemanfaatan dana desa pada kelima desa yang menjadi objek penelitian mengalokasikan sebagian besar anggaran dana desa pada pembangunan infrastruktur. Program-program pembangunan desa, termasuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal termasuk BUMDes dari tahun 2015 hingga 2018 telah memberi manfaat, menurut hasil survei rumah tangga, telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun baru mencapai 10 hingga 15%. Percepatan dan kualitas pembangunan desa diarahkan dan digerakkan secara kreatif dan inovatif berdasarkan kondisi potensi lokal (SDA, SDM, Ekonomi, sosial-budaya) dan eksternal (SDM, modal, kebijakan) yang bisa berbeda atau sama pada aspek-aspek tertentu.
2	Subhan (2019)	Kontribusi Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Teluk Langkap, Kabupaten Tebo)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: menggunakan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian yang didapatkan yaitu: sebagian dari dana desa ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam rapat perencanaan yang dilaksanakan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui program apa saja

				yang direncanakan oleh pemerintah desa sehubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. dalam hal ini dibutuhkan pelatihan mengenai program ADD di desa Teluk Langkep. Karena sumber daya masyarakat disana kurang matang dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat (Subhan, 2019) .
3	Rosalia Widiyanti, Hero Priono (2022)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Desa Cerme Lor	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: menggunakan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian yang didapatkan yaitu: pengelolaan dana desa di desa Came Lor dalam usaha pemberdayaan masyarakat sudah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas. Tahap perencanaan dan pelaksanaan dana desa sudah transparan dan mengedepankan prinsip partisipasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan musyawarah desa setiap tahunnya untuk perencanaan program yang bersumber dari dana desa. Namun upaya pemberdayaan masyarakat pada masa pandemic belum dijalankan secara maksimal karena pemerintah desa lebih fokus pada penanganan pandemic dan dana desa banyak dialokasikan untuk bantuan langsung tunai sehingga masyarakat yang terdampak pandemic sangat terbantu.

H. Kerangka Pikir

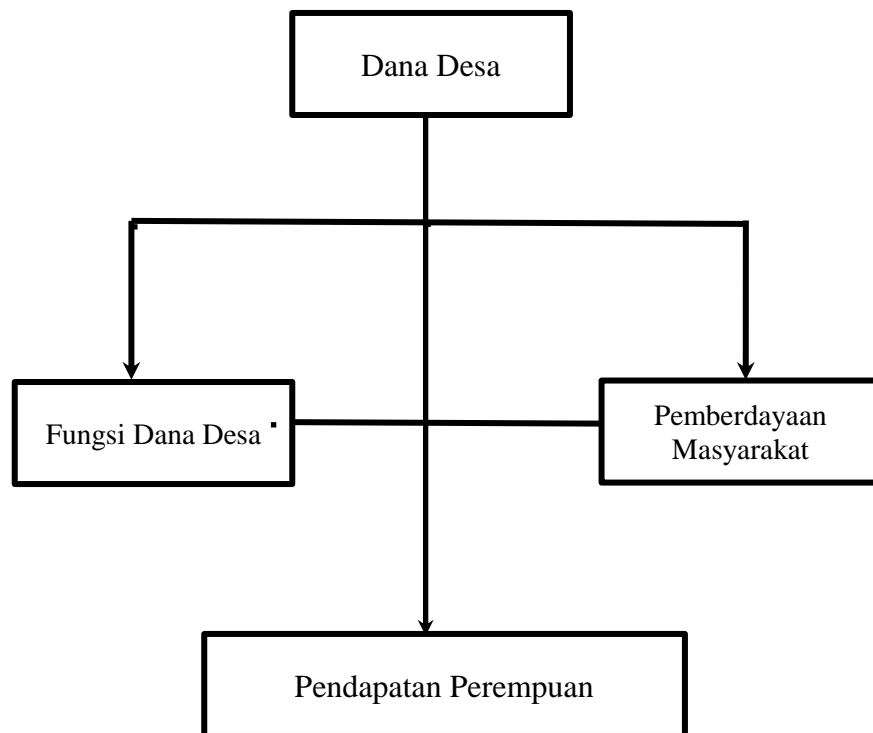
Penyusunan atau penyajian kerangka Pikir penelitian sebagai upaya untuk menjelaskan arah penelitian sehingga memberikan gambaran mengenai konsep-konsep, landasan teoritis serta alur dari penelitian.

Terbitnya undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan kekuatan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam proses pemberdayaan tentu ada tantangan tersendiri, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor penghambat dan faktor pendorong, hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mensinergikan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu sedangkan faktor pendorong yaitu berupa komitmen yang tinggi dari dalam diri sendiri baik individu maupun kelompok.

Pemberdayaan bukanlah program yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara kesinambungan dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat untuk komunitas, sehingga masyarakat berdaya dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya perempuan. Dalam hal tersebut penelitian

ini mengacu pada kerangka yang telah dibuat, melalui alur penelitian sebagai berikut.

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



I. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep/variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi indikator dari suatu konsep/variabel. Definisi yang digunakan sebagai berikut.:

1. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.
3. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan terbelakang.
4. Pendapatan masyarakat adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan.